

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Alam, Wawan Tunggul, 2001, *Hukum Bicara: Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Anand, Ghansham, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo.
- Asikin, Amiruddi dan Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1910, *Black S Law Dictionary*, Second Edition, West Publishing, ST Paul.
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan, 2005, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti, ND dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

_____, *et all*, 2012, *Hukum Adiministrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I*, Pustaka Harapan, Jakarta.

_____, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

_____, 2015, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2006, *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.

_____, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.

Komariah, 2011, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Mangunhardjana, A., 1991, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan pertama, Prenada Media Grup, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

_____, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adhitya Bakti, Bandung.

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- _____, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Moelong, Lexy J., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala, Yogyakarta.
- Marbun, S.F., 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, dan Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberti, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nieuwenhuis, J. H., 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan (terjemahan Djasadin Saragih)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 2007, *Hukum Notariat di Indonesia*, Cet. Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Nasution, M., 2011, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Keatuan Indonesia*, Sofimedia, Jakarta.
- Pohan, Marthalena, 1985, *Tanggung jawab Advokat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prayitno, Rosnantiti, 2008, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Simanjuntak, Enrico, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiadi, Wicipto, 2004, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta.

- _____, & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet. 19, Rajawali Pers, Depok
- Subekti, R., 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta.
- Syarifin, Pinpin, 2008, *Hukum Pidana Di Indoensia Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKK*, Cet ke-2, Pustaka Setia, Bandung.
- Soeroso, R., 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Erlangga, Jakarta.
- _____, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Utrecht, E., 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, Bandung.
- Widhyadharma, Ignatius Ridwan, 2001, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Imbar, Semarang.
- Zulkarnaen, H. dan Dwi Mayaningsih, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Setia, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang 2021 Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

3. Tesis/Jurnal/Makalah

Atmaja, Gede Marhaendra Wija, *Prinsip dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan*, 2015, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,
<https://repository.unud.ac.id/protected/storage/upload/repository.pdf>.

Arisaputra Muhammad Ilham. Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2021, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/106>.

C.J, Antonius Andri, "Peranan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Terhadap Akta Yang Dibuatnya Di Kabupaten Sleman", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Erwiningsih, Winahyu, "Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, September 2006.

Farina Thea, Sudarsono, A. Rahmad Budiono, Iwan Permadi, "Legal Implication of Accuracy Principles Negligence in Making Deed", *Jurnal Academic Research International*, Volume 5(5), 2014,
<https://www.semanticscholar.org/paper/Legal-Implications-of-Accuracy-Principles-in-Making-Farina-Budiono>.

Fahrul, "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal Repertorium*, Vol.7 No.2, Edisi November 2018

Giovani, Grace. "Notaris: Kedudukan, Fungsi, Dan Peranannya", 20 Maret 2017, [http:// notarisgracegiovani.com](http://notarisgracegiovani.com).

HR Ridwan, 2011, "Peradilan Tata Usaha Negara: Wujud Keberhasilan Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru", *Makalah*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII

- Hadjon, Philipus M., *et all*, Tentang Wewenang, *Jurnal Yuridika*, Vol 7 No. 5-6 Tahun XII, Sep-Des 1997
- Hidayat Pratama Putra, Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1, Februari 2020.
- M, Dwi Hastisetya, “Peranan Majelis Kehormatan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pemeriksaan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.
- Pratiwi, Cekil Setya, dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik: Hukum Administrasi Negara, 2018, *Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)*, Jakarta.
- Rumokoy, Nike K., Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan, *Jurnal Unsrat*, Vol. XVIII/No.3/Mei-Agustus, 2010.
- Schroeder, Christopher H.”Coreective Justice And Liability For Increasing Risk” *Ucla Review*, Vol 37:439, 1990.
- Syafrudin, Ateng, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justitia*, Edisi IV Tahun 2000, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Setiawan, Yudhi dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Cacat Yuridis Dalam Prosedur Sebagai Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Equality* 13 No.1 2008: 1-9.
- Safi, ”Konsep Pertanggung jawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia”, *Jurnal Pamator*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2010.
- Santoso, Bagus Teguh dan Sadjino, “Keputusan Fiktif Positif Sebagai Bentuk Reformasi Birokrasi Berdasarkan Prinsip Good Governance”, *Jurnal Peratun I* No. 1, 2018.
- Sri, Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative law & Governance Journal*, Vol. 2 Issue 1, Maret 2019.
- Utami, Sri, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”,

Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015,
<https://media.neliti.com/media/publications/213042-perlindungan-hukum-terhadap-notaris-dala.pdf>.

Utomo, Hatta Isnaini “Wahyu, Hakikat Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Umum”, *Disertasi*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2020.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/G/2018/PTUN-TPI

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 119/B/2019/PT.TUN-MDN

Putusan Mahkamah Agung No.569/K/TUN/2019.